

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori atribusi

Teori atribusi (*attribution theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mempelajari proses bagaimana seseorang mengintrepretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang mengintrepretasikan alasan atau sebab perilakunya (Steers, 1988). Teori ini mengargumentasikan perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha, sedangkan kekuatan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar misalnya keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Frits Heider, 1958). Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi dan tergerak hatinya untuk memahami lingkungan dan sekitarnya dan sebab kejadian tertentu (Lubis, 2020).

Teori atribusi berusaha menjelaskan cara kita mempertimbangkan orang secara berbeda dan teliti, tergantung pada arti atau makna yang kita hubungkan pada perilaku tertentu. Apabila kita mengamati dengan teliti perilaku seseorang, kita berusaha mempertimbangkan apakah disebabkan perilaku faktor internal atau eksternal.

Dalam konteks audit, teori atribusi banyak digunakan peneliti untuk menjelaskan mengenai penilaian auditor, penilaian kinerja, dan pembuatan

keputusan oleh auditor. Atribusi berhubungan dengan penilaian dan menjelaskan bagaimana seorang auditor berperilaku dan bertindak. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan banyak ditentukan oleh atribusi internal, dimana factor yang menentukan kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri, pikiran seorang auditor.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu dan akhir terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.

Hubungan teori atribusi dengan audit internal adalah bagaimana menjelaskan dan mendeskripsikan perilaku seseorang yang dilakukannya melalui factor internal yang berkaitan dengan sifat, karakter, perilaku, dan sikap. Factor eksternal yang berkaitan dengan tekanan situasi dan kondisi lingkungan yang memberi pengaruh terhadap perilaku seseorang.

2. Audit internal

Audit internal adalah perang yang menantang dan penting yang membantu organisasi untuk berhasil. Peran audit internal adalah untuk memberikan jaminan dan konsultasi indeviden. Audit internal tidak hanya perlu memahami risiko keuangan tetapi juga harus memahami aspek organisasi yang lebih luas untuk mendukung peningkatan bisnis (Fahmi & Syaputra, 2019).

(Muslim, Rahim, Peli & Pratiwi, 2020) mengemukakan bahwa sebuah audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif dan efisien pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar serta argument yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah di telaah. Ikatan auditor internal (institute of internal auditor – IIA) dikutip oleh messier (2005:514), mendefinisikan audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu organisasi mencapai tujuan pencapaiannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa audit intern merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam menyediakan mengelola informs, dengan tujuan terakhirnya yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan audit intern dilakukan secara independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak apapun dan tidak melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan yang akan di audit.

Kegiatan penilaian ini bersifat independen bukanlah dalam arti absolut yang berarti bebas dari semua ketergantungan, tetapi mengandung arti pengertian bahwa internal auditor bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang

diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian objektif dan positif. Definisi tersebut juga tidak hanya mencakup peranan dan tujuan auditor internal, tetapi juga menyatakan lingkup yang luas dari audit internal modern yang lebih menekankan pada penambahan nilai dan semua hal yang berkaitan dengan risiko, tata kelola, dan pengendalian. Dan Mulyadi (2002:29) menyatakan bahwa auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas utamanya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah di patuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan keadaan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

Audit internal dalam inspektorat adalah suatu proses sistematis, independen, dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, control, dan tata kelola organisasi. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja, kepatuhan, dan integritas operasional unit-unit dalam suatu organisasi dan pemerintahan atau lembaga publik.

Tujuan utama dari audit internal di inspektorat adalah untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan staf, dan pengujian terhadap system dan proses yang ada.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang audit internal dalam inspektorat di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan ini merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan lingkungan pemerintahan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menjaga keandalan pelaporan keuangan, mengamankan asset Negara, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Departemen audit internal dalam inspektorat yang efektif harus memiliki beberapa karakteristik dan menjalankan fungsi-fungsi. Dengan memenuhi karakteristik dan menjalankan fungsi-fungsi ini, departemen audit internal dalam inspektorat dapat berperan efektif dalam membantu organisasi mencapai tujuan, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

a) independensi dan objektivitas

- departemen audit internal harus bersifat independen dari unit operasional yang di audit untuk menghindari konflik kepentingan.
- Auditor internal harus objektif dan tidak memihak, memberikan penilaian yang tidak bias berdasarkan bukti audit yang diperoleh.

b) Kompetensi dan keahlian

- Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka.
- Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan harus diadakan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor.

c) Perencanaan audit yang baik

- Program kerja audit tahunan harus disusun berdasarkan penilaian risiko untuk memastikan bahwa area-area yang paling kritis dan berisiko tinggi mendapat perhatian yang memadai.
- Audit harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan rencana audit yang jelas, tujuan yang spesifik, dan jadwal yang realistis.

d) Pelaksanaan audit yang efektif

- Proses audit harus melibatkan pengumpulan bukti yang cukup dan relevan melalui berbagai teknik seperti wawancara, pemeriksaan dokumen, observasi, dan pengujian.
- Auditor harus mengikuti prosedur dan metodologi audit yang ditetapkan, termasuk menggunakan alat dan teknik audit yang tepat.

e) Komunikasi dan pelaporan yang jelas

- Temuan audit harus di dokumentasikan dengan jelas dan disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan audit yang mencakup rekomendasi yang konstruktif.
- Komunikasi yang baik dengan audit selama dan setelah proses audit untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang temuan dan rekomendasi.

f) Tindak lanjut dan pemantauan

- Departemen audit internal harus memastikan bahwa rekomendasi audit di implementasikan secara efektif oleh unit yang di audit.

- Proses tindak lanjut harus dilakukan untuk memantau kemajuan implementasi rekomendasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tujuan audit internal menurut Tugiman (2003 : 53-59) mengatakan bahwa “tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Pemeriksaan internal melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Adapun menurut Lawrence B. Sawyer (2006) mengatakan bahwa tujuan audit internal adalah untuk membantu organisasi dalam merencanakan dan melakukan audit, serta mengevaluasi tindak lanjut dari hasil audit. Mengidentifikasi semua kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya juga merekomendasikan peningkatan control internal dan operasional system secara objektif. Memastikan kepatuhan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di organisasi.

Audit internal memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencegahan fraud dalam inspektorat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana audit internal berkontribusi terhadap pencegahan fraud:

1. Evaluasi dan Penguatan Pengendalian Internal

- Audit internal menilai efektivitas dan kecukupan pengendalian internal dalam organisasi. Pengendalian internal yang kuat merupakan langkah pertama dalam mencegah fraud.

- Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan pengendalian internal, auditor internal membantu mengurangi peluang terjadinya fraud.

2. Penilaian Risiko Fraud

- Auditor internal melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi area-area dalam organisasi yang rentan terhadap fraud.
- Pemahaman yang mendalam tentang risiko ini memungkinkan auditor untuk merancang langkah-langkah pencegahan yang tepat.

3. Deteksi Awal Fraud

- Melalui audit rutin, pengujian transaksi, dan pemeriksaan dokumen, auditor internal dapat mendeteksi tanda-tanda awal adanya fraud.
- Deteksi dini memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan cepat sebelum masalah menjadi lebih besar

4. Pengawasan dan Pemantauan Berkelanjutan

- Auditor internal melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas dan transaksi dalam organisasi.
- Pemantauan ini membantu dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang dapat menunjukkan adanya fraud.

5. Pelaporan Temuan dan Tindak Lanjut

- Jika auditor internal menemukan indikasi fraud, mereka melaporkannya kepada manajemen dan, jika perlu, kepada pihak berwenang.
- Auditor juga memastikan bahwa tindakan perbaikan yang diperlukan diambil untuk mengatasi temuan fraud dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

6. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

- Auditor internal dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang risiko fraud melalui program pelatihan dan edukasi.
- Dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana fraud terjadi dan bagaimana mencegahnya, organisasi dapat membangun budaya kepatuhan dan integritas.

7. Rekomendasi untuk Perbaikan Prosedur dan Kebijakan

- Berdasarkan temuan audit, auditor internal memberikan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan yang dapat mengurangi risiko fraud.
- Implementasi rekomendasi ini dapat mencakup peningkatan prosedur verifikasi, segregasi tugas, dan peningkatan keamanan sistem informasi.

8. Investigasi Kasus Fraud

- Jika ada kasus fraud yang teridentifikasi, auditor internal dapat melakukan investigasi mendalam untuk menentukan bagaimana fraud terjadi dan siapa yang terlibat.
- Investigasi ini juga memberikan wawasan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

9. Mendorong Budaya Etis dan Transparansi

- Audit internal berperan dalam mendorong budaya etis dan transparansi dalam organisasi.

- Dengan menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan, audit internal membantu membangun lingkungan kerja yang tidak toleran terhadap fraud.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, audit internal membantu organisasi dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons fraud secara efektif, meningkatkan akuntabilitas dan integritas keseluruhan operasi organisasi.

3. Kecurangan (fraud)

Fraud merupakan tindakan bersifat umum dan meliputi berbagai makna berupa cara licik seseorang yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan dengan menyajikan yang salah M.Septiani & M Rebeca (2020) . Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja sehingga berdampak terhadap salah saji materi dalam laporan keuangan.

Sementara menurut Sihombing dan Rahardjo (2014) kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja dan ataupun ketidak hati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kelalaian atau kesenjangan ini bersifat material sehingga dapat mempengaruhi aspek-aspek yang akan berdampak terhadap pengambilan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan. Menurut Australian Audit Standars (AUS) dalam Fraudulent financial Reporting adalah salah saji yang dilakukan dengan sengaja termasuk didalamnya kelalaian jumlah serta pengungkapan dalam laporan keuangan dengan tujuan melakukan menyamarkan, serta menipu pengguna laporan keuangan.

Fraud merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sadar, tahu dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya asset dan kekayaan perusahaan dan Negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian memberikan pembenaran terhadap penyalahgunaan tersebut. Jika seseorang secara tidak sengaja memalsukan data yang salah ketika mencatat suatu transaksi, maka itu tidak dapat dikatakan fraud karena dilakukan dengan tidak sengaja. Tetapi, jika seseorang dengan kecerdikannya merekrut laporan keuangan untuk menarik minat calon investor untuk menanamkan modal pada lini bisnis tersebut maka tindakan yang demikian dapat dikategorikan sebagai fraud, menurut (Sihombing 2014).

Menurut Albacht et al (2011) fraud adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menipu dan dalam jurnalnya menjelaskan adanya beberapa elemen, yaitu:

- a. Perjanjian (*A representation*)
- b. Menyangkut hal hal yang material (*about a material point*) dan dilakukan dengan sengaja serta ceroboh (*and intentionally or recklessly so*)
- c. Yang dipercayai (*which is believed*)
- d. Dilakukan pada korban (*acted upon by the victim*)
- e. Untuk kerugian korbannya (*to the victim's damage*)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai:

- 1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pembaca laporan keuangan.

- 2) Salah saji yang timbul dari kelakuan yang tidak semestinya, hal ini sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk penggelapan tanda terima barang uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atas dokumen palsu atau yang menyesatkan dan menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan atau pihak ketiga.

Menurut Amin Widjaja (2013) terdapat dua tipe kecurangan akuntansi yaitu:

- 1) Kecurangan eksternal Kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah.
- 2) Kecurangan internal Tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kecurangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan itu sendiri.

Menurut Arens (2008:432), penyebab terjadinya kecurangan disebut dengan segitiga kecurangan (fraud triangle), yaitu:

- 1) Insentif/tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Karyawan mungkin merasa mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan atau masalah finansial.
- 2) Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Longgarnya pengendalian internal dan kurangnya pengasawan dalam suatu perusahaan dapat memicu karyawan untuk melakukan kecurangan. Dari longgarnya pengendalian dan kurangnya pengawasan tersebut karyawan merasa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan.
- 3) Sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Tujuan pencegahan *fraud* menurut Karyono (2013:47) adalah sebagai berikut:

- 1) Prevention: mencegah terjadinya kecurangan
- 2) Deterrence: menangkalkan pelaku potensial
- 3) Description: mempersulit gerak langkah pelaku fraud
- 4) eneRecertification: mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan
- 5) Civil action prosecution: tuntutan kepada pelaku

(Mursalim, et al. 2023) dalam penelitiannya, Kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi akibat dua faktor yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor

dari luar (eksternal). Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi adalah pengendalian internal. *Fraud* yang terjadi harus dicegah dengan cara: membangun stuktur pengendalian yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, mengefektifkan fungsi audit internal. Dari pernyataan itu maka dapat disimpulkan bahwa manajemen harus mengambil keputusan dan kebijakan khusus dalam mencegah terjadinya fraud didalam perusahaan. Diantaranya penting bagi perusahaan mrmiliki kebijakan internal control untuk mengendalikan risiko fraud (Fahmi & Syaputra, 2019).

Ada empat pilar utama dalam memerangi *fraud* yaitu:

- a. Pencegahan kecurangan (*fraud prevention*)
- b. Pendeteksian dini kecurangan (*early fraud detection*)
- c. Investigasi kecurangan (*fraud investigation*)
- d. Penegakan hukum atau sanksi (*follow-up legas action*)

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti yang berkaitan dengan topic penelitian ini adalah:

Tabel 2.1. penelitian terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Muhammad Fahmi & Mhd Ridho Syaputra (2019)	Peranan audit internal dalam pencegahan <i>fraud</i>)	Audit internal, pencegahan <i>fraud</i>	Penelitian ini hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh

				yang dilakukan telah memadai didukung dengan pengujian unsur audit internal dari perencanaan hingga tindaklanjut yang ada telah berjalan efektif, (2) peranan audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh telah berperan dalam pencegahan <i>fraud</i> , (3) dimana unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2.	Aji Ahmad Fachruroji (2020)	Pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan dalam laporan keuangan	Audit internal, pencegahan kecurangan dalam laporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penipuan dalam laporan keuangan.

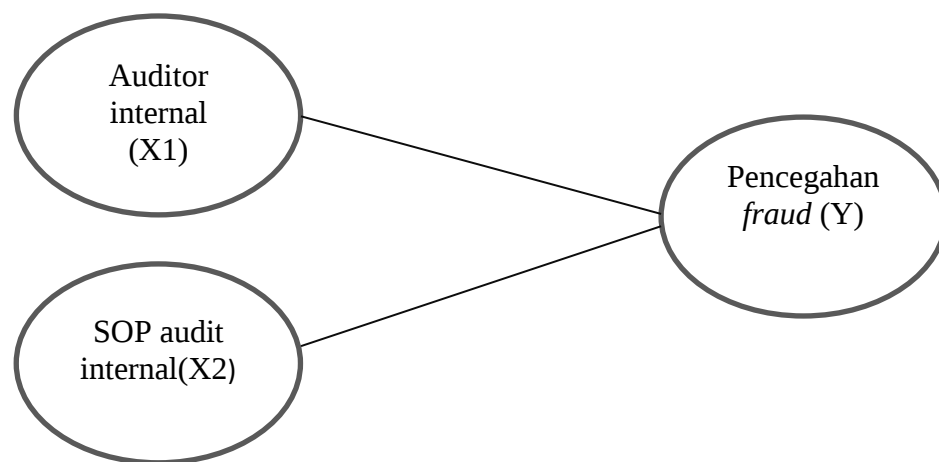
3.	Irmah Halimah Bachtiar & Ela Elliyana (2020)	Determinan upaya pencegahan <i>fraud</i> pemerintah desa	Pengendalian internal, budaya etis organisasi karakteristik personal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan budaya etis organisasi mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i>
4.	Yogi Ginjar & Mulya Syamsul (2020)	Peran auditor internal dalam pendeteksian dan pencegahan <i>fraud</i> pada Bank Syariah di kota Bandung	Peran audit internal, deteksi penipuan, pencegahan penipuan, bank Indonesia Bandung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor internal berpengaruh terhadap deteksi <i>fraud</i> sebesar 26,72%, dan peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> sebesar 43,16%.
5.	Anandita Zulia Putri & Frida Dwi Prasiswi (2021)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Budaya organisasi, moralitas, kompetensi aparatur, pengendalian internal system, pencegahan penipuan dalam keuangan Desa manajemen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kecurangan pencegahan dalam pengelolaan keuangan desa.

6.	Fadly Chandra et al., (2021)	Peran mediasi pengendalian internal dan budaya etis terhadap tindakan <i>fraud</i>	Budaya etis efektivitas pengendalian internal, investasi anti <i>fraud</i> , segitiga penipuan, tindakan fraud	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi peningkatan investasi anti <i>fraud</i> berpengaruh positif pada variable mediasi budaya etis dan pengendalian internal.
7.	Komang Yoga Mahendra et al., (2021)	Pengaruh audit internal dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) pada Bank BUMN di Denpasar	Efektivitas pengendalian internal, pencegahan penipuan, audit internal	Berdasarkan hasil uji hipotesis statistic t diketahui bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada Bank BUMN di Denpasar, otoritas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada Bank BUMN di Denpasar. Berdasarkan hasil uji hipotesis F menjelaskan bahwa variable audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable pencegahan kecurangan pada Bank BUMN di Denpasar.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan teori yang telah dikemukakan di atas maka kerangka konseptual yang diajukan adalah:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

1. auditor internal dan pencegahan *fraud*

Dalam menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, tindakan *fraud* dapat di cegah dengan menelaah peraturan perundang-undangan, merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat sesuai dengan kuakifikasi yang telah ditetapkan, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas internal auditor, dan menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat agar kinerja audit dapat berjalan dengan lancar. Dalam penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-fraud, tindakan fraud dapat dicegah dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan

yang mungkin terjadi, mengurangi kemungkinan risiko kecurang tersebut, serta mengimplementasikan dan melakukan monitoring pengendalian intern. Dalam pengembangan proses pengawasan (oversight process), tindakan fraud dapat dicegah dengan melakukan fungsi pengawasan yang tepat.

Untuk mencegah terjadinya *fraud*, keberadaan audit internal sangat diperlukan dalam sector pemerintahan. Audit internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, objektif serta dapat memberikan keyakinan yang memadai dan penyediaan konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dalam kegiatan organisasi. Tugas audit internal yaitu untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah, melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi suatu system dan prosedur, serta diimplementasikan secara benar, melalui pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit kerja organisasi. Selain itu, audit internal juga melakukan analisis, evaluasi, serta memberikan rekomendasi berupa saran-saran atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Dalam hal ini, inspektorat merupakan lembaga yang mewadahi unsur pembinaan terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintahan dengan melakukan tindakan preventif dan menciptakan hubungan kemitraan antar pemerintah daerah ddalam upaya pencegahan fraud di pemerintah daerah.

H1: auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada inspektorat daerah Kabupaten Muna

2. SOP audit internal dan pencegahan *fraud*

Faktor utama diperlukannya audit internal adalah meluasnya rentang kendali yang dihadapi instansi di pemerintahan kabupaten yang memiliki pegawai serta mengelola kegiatan yang bervariasi sesuai bidang yang ada. Sehingga, berbagai penyimpangan dan ketidakwajaran dalam menyelenggarakan laporan keuangan daerah ataupun yang bersifat nonkeuangan merupakan potensial masalah nyata yang harus dihadapi. Untuk mendeteksi dan mencegah berbagai masalah yang ada pada system birokrasi pemerintahan maka diperlukan auditor internal untuk melakukan pengawasan serta pembinaan.

Saat pencegahan *fraud* audit internal harus memiliki kemampuan yang memadai. Internal audit harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Pengendalian internal yang kuat akan mampu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan, jika pengendalian internalnya lemah maka kecenderungan kecurangan akan semakin besar. Untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi maka seorang auditor harus memiliki cara-caranya, yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik, mengefektifkan efektivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi (komunitas pencegah *fraud*), serta mengefektifkan fungsi internal audit.

Dalam hal ini SOP sangat diperlukan dalam menangani tindakan kecurangan. SOP membantu memastikan bahwa setiap tahap audit dilakukan secara konsisten dan sistematis dan membantu menciptakan transparansi dalam pelaksanaan audit internal. SOP dalam pemerintahan memberikan wawasan

tentang bagaimana audit internal dapat memengaruhi kualitas penjagaan. Dengan adanya SOP audit internal yang jelas dan terstruktur, diharapkan terjadi peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap tugas dan tanggungjawab. SOP yang baik juga dapat membantu pemerintah memahami prosedur kerja yang harus diikuti, sehingga meningkatkan kinerja dan efektivitas penjagaan.

Secara keseluruhan, SOP audit internal di inspektorat Pemerintahan berperan penting dalam memastikan bahwa proses audit berjalan dengan baik, hasil audit dapat di andalkan, dan tujuan pengawasan serta pengendalian internal tercapai dengan efektif.

H2: SOP audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di isnpektorat daerag Kabupaten Muna